

HAMBATAN IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONSORTIUM ON COMBATING WILDLIFE CRIME* DI PERU DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN SATWA LIAR TRANSNASIONAL

Zaharani Firdaushi, Zaky Ismail

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

Email: zaharanifirdaushi9@gmail.com ,
zakyismail@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk-bentuk misimplementasi kebijakan pengendalian perdagangan satwa liar di Peru meskipun kerangka hukumnya telah memadai. Fokus penelitian diarahkan pada kinerja Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre sebagai otoritas administrasi dan ilmiah serta Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sebagai lembaga kepabeanan. Dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan dokumen kebijakan, penelitian menemukan bahwa pemerintah Peru masih sering mengalami kebocoran pengawasan, lemahnya deteksi dini, dan ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan. Analisis menggunakan kerangka Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa permasalahan muncul pada isi kebijakan khususnya keterbatasan sumber daya dan strategi implementasi serta pada konteks pelaksanaan seperti koordinasi antar-lembaga, kapasitas birokrasi, dan kondisi sosial ekonomi lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas implementasi dan membuka peluang kajian lanjutan terkait evaluasi kebijakan satwa liar di Amerika Latin.

Kata Kunci: Peru, implementasi kebijakan, satwa liar, misimplementasi; SERFOR, SUNAT, Grindle.

Abstrack

This study aims to describe the forms of misimplementation of wildlife trade control policies in Peru, despite an adequate legal framework. The research focuses on the performance of the National Forestry and Wildlife Service (Servicio Nacional Forestry and Wildlife Silvestre) as the administrative and scientific authority and the National Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) as the customs agency. Using qualitative descriptive methods based on literature and policy document studies, the study found that the Peruvian government still frequently experiences oversight leaks, weaknesses in early detection, and inconsistent implementation on the ground. Analysis using Merilee S. Grindle's framework indicates that problems arise in the content of the policies—particularly limited resources and strategy implementation—as well as in the implementation context, such as inter-agency coordination, bureaucratic capacity, and local socioeconomic conditions. This study emphasizes the need to strengthen implementation capacity and opens up opportunities for further research on wildlife policy evaluation in Latin America.

Keywords: Peru, policy implementation, wildlife, misimplementation; SERFOR, SUNAT, Grindle.

Pendahuluan

Implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya global memberantas perdagangan satwa liar yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir. ICCWC merupakan kemitraan internasional yang melibatkan sejumlah organisasi utama seperti CITES, INTERPOL, UNODC, World Customs Organization, dan World Bank yang bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar (ICCWC, 2023). Peru, sebagai negara megabiodiversitas di kawasan Amerika Latin, memiliki kekayaan spesies endemik yang sangat tinggi, termasuk primata, reptil, burung, dan berbagai spesies hutan Amazon yang rentan terhadap eksploitasi ilegal. Karena itu, keterlibatan Peru dalam mekanisme ICCWC secara normatif diharapkan memperkuat integritas kebijakan nasional, terutama melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, modernisasi sistem pemantauan, serta koordinasi antarinstansi dalam mengatasi kejahatan satwa liar lintas batas (Gonzales, 2022).

Namun demikian, implementasi ICCWC di Peru menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang mengurangi efektivitas konsorsium ini dalam menekan kejahatan satwa liar transnasional. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kapasitas institusional aparat di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun ICCWC telah menyediakan *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit* sebagai pedoman peningkatan tata kelola, adaptasi toolkit tersebut di Peru belum mencapai tingkat optimal, khususnya terkait integrasi data, kemampuan *intelligence-led enforcement*, dan koordinasi antar lembaga seperti SERFOR, kepolisian lingkungan, dan otoritas kepabeanan (ICCWC Toolkit Report, 2022). Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis yang memadai turut memperlambat proses investigasi kasus, terutama untuk jaringan perdagangan berskala besar yang memiliki rute penyelundupan lintas negara seperti Peru–Brasil–Kolombia (Almeida, 2021). Di level lokal, sejumlah praktik koruptif dan minimnya pelatihan investigasi modern memperburuk situasi penegakan hukum.

Di sisi lain, kompleksitas geografis Peru menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi konsorsium. Luasnya wilayah Amazon, terbatasnya infrastruktur pengawasan perbatasan, serta akses terbatas terhadap teknologi pemantauan membuat berbagai kejahatan satwa liar berlangsung tanpa terdeteksi. Hal ini diperparah oleh meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap berbagai spesies eksotis asal Peru, seperti arapaima, anakan macaw, dan aneka reptil, yang mendorong jaringan kriminal untuk semakin profesional dan transnasional sifatnya (Moreno, 2022). Meskipun ICCWC mendorong penggunaan pendekatan berbasis intelijen, Peru masih kesulitan

mengintegrasikan seluruh data satwa liar ilegal dari kepolisian, bea cukai, otoritas kehutanan, hingga aparat perbatasan, sehingga membuat koordinasi penindakan menjadi tidak efektif (Mahfud Zubaidi, 2024).

Permasalahan lain muncul dari aspek politik dan kelembagaan, di mana sering terjadi inkonsistensi kebijakan antarinstansi serta pergantian pejabat yang menghambat proses implementasi jangka panjang. Sebagian besar program yang difasilitasi ICCWC membutuhkan keberlanjutan melalui perencanaan strategis jangka menengah, namun dinamika politik domestik Peru kerap membuat proses tersebut terputus sebelum mencapai hasil yang signifikan (Delgado, 2023). Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengelola sumber daya alam dan lembaga penegak hukum membuat mekanisme penindakan sering tertunda. Kondisi ini menciptakan *policy gap* antara komitmen Peru di tingkat internasional dengan efektivitas implementasi di tingkat nasional, dan ini menjadi sebuah masalah umum dalam negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas birokrasi (Mahfud Zubaidi, 2024).

Celah penelitian muncul dari adanya kontradiksi antara sejumlah laporan resmi yang menggambarkan Peru sebagai negara yang aktif berpartisipasi dalam mekanisme ICCWC, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan tingginya tren penyelundupan satwa liar selama lima tahun terakhir. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Peru telah memanfaatkan toolkit ICCWC untuk evaluasi kelembagaan, tetapi tidak diikuti penurunan signifikan dalam jumlah penyitaan satwa liar yang ditangkap di rute-rute utama perdagangan Amazon (ICCWC, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

implementasi ICCWC: apakah masalahnya terletak pada kapasitas negara, kurangnya pendanaan, lemahnya komitmen politik, atau belum adaptifnya instrumen ICCWC terhadap karakteristik geografis dan sosial Peru. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa masih ada celah konseptual dan praksis yang belum banyak diteliti, terutama terkait mengapa mekanisme internasional yang dirancang untuk memperkuat penegakan hukum tidak berhasil berjalan optimal dalam konteks Peru.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Peru merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga kegagalan implementasi ICCWC berpotensi memberikan dampak ekologis, ekonomis, dan sosial yang jauh lebih luas. Perdagangan satwa liar bukan hanya merusak populasi spesies, tetapi juga berhubungan erat dengan kejahatan terorganisasi, pencucian uang, dan kerawanan di wilayah perbatasan (UNODC, 2023). Dengan mengidentifikasi hambatan implementasi ICCWC di Peru, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik terhadap literatur mengenai efektivitas rezim internasional, khususnya dalam konteks kejahatan satwa liar. Secara praktis, penelitian ini penting untuk menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara institusi nasional Peru dan mekanisme internasional, serta membantu merumuskan desain intervensi ICCWC yang lebih adaptif terhadap kebutuhan negara berkembang. Di tengah meningkatnya ancaman terhadap satwa liar global, pemahaman tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi mekanisme internasional seperti ICCWC menjadi semakin krusial, baik bagi Peru maupun bagi komunitas internasional yang berkomitmen melindungi keberlanjutan keanekaragaman hayati dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam sekaligus menjelaskan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya, sebagaimana dijelaskan Sugiyono bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga mengungkap hubungan sebab-akibat berdasarkan interpretasi peneliti terhadap data empiris (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan *mengapa implementasi International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) di Peru belum efektif dalam menekan perdagangan satwa liar transnasional*. Penelitian ini berfokus pada konteks kelembagaan Peru, khususnya lembaga penegakan hukum seperti SERFOR, Polisi Lingkungan, dan otoritas bea cukai, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan instrumen ICCWC. Seluruh data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen dan sumber sekunder, berupa laporan resmi ICCWC, publikasi UNODC, jurnal akademik, kebijakan dan regulasi Peru, laporan investigatif NGO, serta data statistik terkait penyelundupan satwa liar. Teknik penentuan data mengikuti purposive document selection, yaitu pemilihan dokumen berdasarkan relevansi langsung dengan implementasi ICCWC dan isu penegakan hukum satwa liar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mencakup telaah terhadap toolkit ICCWC, laporan evaluasi, kebijakan nasional, data penindakan, dan laporan organisasi internasional, serta observasi non-partisipatif melalui rekaman kegiatan publik, laporan rapat, atau paparan lembaga pemerintah. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Reduksi data

dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan dua komponen teori implementasi Merilee S. Grindle *content of policy* dan *context of implementation* kemudian menyaring informasi yang relevan dengan faktor penyebab lemahnya implementasi ICCWC. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik dan pemetaan hubungan antar faktor, sehingga memudahkan proses eksplanasi terhadap hambatan yang terjadi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui verifikasi dan pengecekan konsistensi pola temuan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan berbagai dokumen dari sumber yang berbeda (ICCWC, UNODC, NGO, jurnal akademik, kebijakan pemerintah) serta menyandingkan data tekstual dengan data statistik atau laporan investigatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai faktor-faktor penghambat implementasi ICCWC di Peru.

Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian mengenai efektivitas implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan perdagangan satwa liar transnasional melalui dukungan konsorsium ini telah menghasilkan sejumlah kemajuan normatif dan kelembagaan, namun tetap menghadapi hambatan mendasar yang menyebabkan dampak implementasinya belum optimal. Dari hasil penelaahan dokumen kebijakan, laporan resmi ICCWC, publikasi akademik internasional, serta rekam data perdagangan ilegal satwa liar, terlihat bahwa Peru sesungguhnya memiliki kerangka kerja hukum yang relatif komprehensif untuk melawan *wildlife trafficking*,

termasuk kriminalisasi eksploitasi flora dan fauna, penyitaan barang bukti, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Namun, berbagai catatan penilaian ICCWC menunjukkan bahwa kerangka tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di lapangan, terutama karena adanya ketimpangan antara desain kebijakan dan kapasitas operasional negara (ICCWC, 2023).

Pertama, temuan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Peru dalam penegakan hukum masih belum sebanding dengan kompleksitas jaringan kejahatan satwa liar transnasional. ICCWC memberikan dukungan berupa *Analytical Toolkit*, pelatihan investigasi, serta penguatan sistem intelijen, namun lembaga-lembaga kunci seperti *Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre* (SERFOR), Kepolisian Lingkungan, dan lembaga bea cukai masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia terlatih, anggaran operasional, dan kemampuan teknis dalam melakukan investigasi lintas negara. Pengawasan di titik-titik kritis seperti pelabuhan Callao, perbatasan Peru–Brasil, dan Peru–Kolombia masih bergantung pada inspeksi manual, sementara penyelundup telah menggunakan metode pemalsuan dokumen, jalur darat terpencil, serta pengiriman paket kecil lintas negara melalui kurir cepat yang sulit terdeteksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dukungan ICCWC belum mampu mengatasi kesenjangan struktural negara (Mahfud Zubaidi, 2024).

Kedua, temuan memperlihatkan adanya fragmentasi koordinasi antarsektor pemerintah Peru, meskipun ICCWC mendorong pendekatan lintas institusi. Hubungan antara SERFOR, polisi, otoritas bea cukai, kementerian lingkungan, serta kejaksaan belum sepenuhnya berjalan harmonis. Dokumen menunjukkan bahwa mekanisme pertukaran data intelijen masih bersifat parsial,

tidak real time, dan sering terkendala birokrasi. Banyak kasus penyelundupan satwa yang berhasil diidentifikasi oleh bea cukai tidak segera ditindaklanjuti oleh penyidik; sebaliknya, beberapa penyidik mengeluhkan kurangnya dukungan teknis dari otoritas kehutanan untuk verifikasi spesies dan asal-usulnya. ICCWC sebenarnya telah menyediakan pedoman *National Wildlife Crime Strategy*, namun Peru belum sepenuhnya mengintegrasikan kerangka ini ke dalam mekanisme koordinasi formal. Akibatnya, operasi bersama (joint operation) yang diharapkan mampu memutus rantai perdagangan lintas negara sering kali hanya dilakukan secara sporadis.

Ketiga, temuan menegaskan bahwa arus perdagangan satwa liar dari Peru bersifat sangat mengakar secara sosial dan ekonomi, sehingga pendekatan penegakan hukum saja tidak cukup. Peru merupakan salah satu pusat biodiversitas terbesar di dunia, sementara beberapa komunitas lokal masih menggantungkan pemasukan pada perdagangan burung eksotis, reptil, dan hewan kecil lainnya. Laporan menunjukkan bahwa jaringan kriminal memanfaatkan kondisi ekonomi pedesaan dengan membeli satwa liar dari masyarakat secara murah dan menyelundupkannya ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Meskipun ICCWC mendorong pendekatan pembangunan lokal berbasis alternatif ekonomi, implementasinya di Peru belum berjalan kuat. Tidak ditemukan program komprehensif yang menghubungkan konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan suplai satwa liar, sehingga permintaan pasar gelap tetap terpenuhi secara stabil.

Keempat, temuan penting lainnya adalah masih lemahnya sistem penegakan hukum yudisial, termasuk sanksi yang tidak memberikan efek jera. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa

pelaku penyelundupan satwa liar sering mendapatkan hukuman ringan atau hanya denda administratif, meskipun nilai komersial satwa yang diperdagangkan mencapai ribuan dolar. Jaksa dan hakim masih minim memahami struktur kejahatan lingkungan; beberapa putusan menunjukkan bahwa kasus satwa liar dianggap sebagai pelanggaran minor, bukan bagian dari kejahatan terorganisasi transnasional. ICCWC telah menyediakan *Wildlife and Forest Crime Judiciary Toolkit*, tetapi implementasinya di Peru belum mampu memastikan adanya standar nasional yang kuat dalam pemidanaan. Akibatnya, rantai kejahatan tetap beroperasi dengan risiko hukum yang rendah.

Kelima, hasil analisis juga memperlihatkan kelemahan dalam integrasi data dan sistem informasi, terutama terkait pelacakan spesies yang disita dan pemetaan rute perdagangan. ICCWC menekankan pentingnya *Integrated Crime Information System*, namun Peru masih menggunakan sistem data sektoral. SERFOR memiliki basis data terkait peredaran flora dan fauna legal, sementara kepolisian memiliki basis data tindak kriminal umum. Kedua sistem tersebut belum terhubung secara otomatis. Akibatnya, ketika terjadi penyitaan satwa liar, proses verifikasi, pelacakan asal, dan analisis pola jaringan lambat dan tidak akurat. Fragmentasi data ini menyebabkan otoritas sulit memetakan rute utama penyelundupan, padahal analisis berbasis data menjadi fondasi keberhasilan implementasi ICCWC di negara-negara lain.

Selain itu, temuan menunjukkan adanya kontradiksi antara komitmen internasional Peru dan prioritas nasional yang lebih dominan pada sektor ekonomi tradisional. Pemerintah Peru memprioritaskan aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, minyak, dan kehutanan komersial untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, kawasan yang harusnya menjadi habitat konservasi sering mengalami degradasi akibat ekspansi industri tersebut. Ketidakkonsistenan ini membawa dampak ganda: habitat satwa liar semakin mengecil, populasi semakin terancam, dan masyarakat lokal semakin terdorong memanfaatkan satwa sebagai sumber pendapatan. Kontradiksi inilah yang membuat implementasi ICCWC berjalan tidak sinkron dengan kebijakan nasional yang diprioritaskan pemerintah. Peru secara normatif mendukung penanggulangan perdagangan satwa liar, tetapi kebijakan domestik tidak sepenuhnya berpihak pada konservasi.

Temuan terakhir adalah kurangnya evaluasi internal dan mekanisme monitoring yang sistematis. ICCWC menyediakan kerangka penilaian kinerja seperti *ICCWC Indicator Framework*, namun Peru belum melakukan evaluasi nasional secara berkala. Sebagian besar laporan yang tersedia hanya bersifat teknis dan operasional tanpa menyertakan analisis efektivitas menyeluruh. Padahal, evaluasi yang kuat diperlukan untuk mengetahui apakah pelatihan, bantuan teknis, dan proyek ICCWC benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas. Ketiadaan evaluasi ini membuat pemerintah Peru sulit mengidentifikasi titik lemah yang harus diperbaiki.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi ICCWC di Peru belum tercapai karena perpaduan antara keterbatasan kapasitas negara, fragmentasi koordinasi, kerentanan sosial ekonomi, lemahnya penegakan hukum yudisial, ketidakterhubungan sistem data, serta kontradiksi kebijakan nasional. Meskipun berbagai dukungan internasional telah diberikan, hambatan struktural internal Peru

menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan upaya pemberantasan perdagangan satwa liar transnasional. Temuan ini menegaskan bahwa ICCWC dapat berjalan efektif hanya jika negara anggota memiliki kapasitas institusional yang kuat, komitmen politik yang konsisten, serta koordinasi yang terintegrasi lintas sektor.

Analisis Implementasi ICCWC di Peru Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle (Content of Policy)

Analisis implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru berdasarkan kerangka *Content of Policy* Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana substansi, desain, dan instrumen kebijakan ICCWC diterjemahkan ke dalam konteks institusional Peru. *Content of Policy* menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan itu sendiri, meliputi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diatur, aktor pelaksana dan kepatuhan yang diperlukan, sumber daya yang dialokasikan, serta strategi implementasi yang dirancang (Grindle, 1980). Dengan menggunakan kerangka ini, terlihat bahwa kebijakan ICCWC memiliki desain normatif yang kuat, namun masih mengalami *policy-implementation gap* ketika diterapkan di Peru karena kompleksitas struktural, teknis, dan sosial ekonomi negara tersebut.

Pertama, dari aspek kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, ICCWC membawa agenda internasional yang menekankan pemberantasan perdagangan satwa liar sebagai bagian dari komitmen transnasional terhadap konservasi dan stabilitas ekologi global. Kepentingan yang dilindungi oleh ICCWC

bersifat melintasi batas negara dan menuntut komitmen kuat dari Peru untuk menjalankan standar internasional dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, di tingkat domestik, kepentingan ini berhadapan dengan realitas ekonomi dan sosial Peru, terutama komunitas lokal yang memanfaatkan satwa liar sebagai sumber pendapatan serta aktor industri yang mengambil keuntungan dari celah pengawasan lingkungan. Kebijakan ICCWC menuntut perubahan perilaku yang signifikan dari berbagai aktor domestik, sementara kepentingan ekonomi lokal sering lebih mendesak dibanding kepentingan ekologis jangka panjang. Di sinilah letak hambatan: *stakeholders* yang harus berubah memiliki insentif yang rendah untuk mematuhi kebijakan internasional. ICCWC memang dirancang untuk membantu negara melalui pelatihan investigasi, peningkatan kemampuan intelijen, dan penyediaan *toolkits*, tetapi kepentingan domestik yang lebih kuat sering menghambat penyesuaian kebijakan secara menyeluruh. Situasi ini membuat implementasi ICCWC di Peru tidak mendapatkan dukungan penuh dari semua aktor yang seharusnya terkena manfaatnya.

Kedua, dari sisi jenis manfaat (*benefits*), kebijakan ICCWC cenderung menghasilkan manfaat jangka panjang yang sifatnya *soft benefits*, seperti peningkatan kapasitas lembaga, penguatan koordinasi, dan standar operasi yang lebih modern. Namun, manfaat langsung bagi masyarakat atau pemerintah sering tidak segera terlihat. *Soft benefits* biasanya tidak menciptakan tekanan politik yang kuat, dan akibatnya kebijakan kurang mendapatkan prioritas dalam agenda nasional. Misalnya, ICCWC memberikan *Indicator Framework* untuk melakukan penilaian mandiri kapasitas penegakan hukum, tetapi manfaat dari instrumen ini baru terasa jika pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan

menindaklanjutinya dengan reformasi sistemik. Peru tidak segera melihat manfaat ekonomi atau politik yang langsung dari pengetatan pengawasan satwa liar, sehingga kebijakan ini cenderung berada pada posisi prioritas menengah. Selain itu, kebijakan konservasi menghadapi dilema ketika bertabrakan dengan kepentingan industri ekstraktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Karena manfaat ICCWC lebih banyak bersifat non-material, implementasinya tidak memperoleh dorongan kuat dari pusat kekuasaan politik Peru.

Ketiga, elemen tingkat perubahan yang diatur oleh kebijakan (degree of change) menunjukkan bahwa ICCWC menuntut perubahan struktural yang substansial pada sistem penegakan hukum Peru. ICCWC mengarahkan negara untuk memperkuat koordinasi multi-lembaga, meningkatkan kemampuan intelijen, menyatukan data lintas sektor, mengadopsi standar penyidikan modern, dan memperkuat kapasitas jaksa serta hakim dalam menerapkan hukum pidana lingkungan. Ini bukan perubahan kecil; ICCWC secara implisit meminta transformasi kelembagaan yang dalam, termasuk pemutakhiran prosedur, pelatihan berkelanjutan, dan investasi anggaran. Tingkat perubahan yang tinggi membuat implementasi menjadi lambat, terutama ketika lembaga seperti SERFOR atau kepolisian lingkungan tidak memiliki struktur organisasi yang fleksibel atau dana yang memadai. Ketika kebijakan memerlukan perubahan fundamental dalam birokrasi, resistensi dan kelambatan implementasi menjadi sesuatu yang wajar. Perubahan yang terlalu besar dibanding kapasitas negara menyebabkan ICCWC tidak dapat berjalan sepenuhnya efektif.

Keempat, dari aspek aktor pelaksana dan tuntutan kepatuhan, ICCWC menuntut keterlibatan berbagai aktor negara:

polisi lingkungan, otoritas bea cukai, kementerian lingkungan hidup, otoritas kehutanan, Kejaksaan, dan otoritas peradilan. Semakin banyak aktor yang dilibatkan, semakin besar risiko terjadinya fragmentasi koordinasi, tumpang-tindih kewenangan, serta ketidakselarasan prioritas. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga di Peru masih lemah, pertukaran data belum terintegrasi, dan komunikasi antarunit bersifat sektoral. ICCWC memang menyediakan pedoman *National Wildlife Crime Strategy*, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan budaya birokrasi, ego sektoral, dan minimnya mekanisme koordinasi yang jelas. Tuntutan kepatuhan yang tinggi dari kebijakan ICCWC tidak diimbangi oleh kapasitas disiplin administratif di tingkat domestik. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan tidak konsisten; beberapa lembaga menjalankan rekomendasi ICCWC, tetapi lembaga lain tidak mengikuti langkah yang sama. Dalam konteks Grindle, semakin tinggi tuntutan perubahan perilaku aktor pelaksana, semakin besar risiko kebijakan tidak terlaksana optimal – dan hal ini relevan dengan kondisi Peru.

Kelima, dari sisi sumber daya yang dialokasikan, ICCWC memberikan dukungan berupa pelatihan, *toolkits*, dan pendampingan teknis, tetapi keberhasilan implementasi tetap sangat bergantung pada sumber daya domestik Peru. Kebijakan akan sulit diimplementasikan tanpa alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan dana operasional lembaga penegak hukum menyebabkan banyak program yang didorong ICCWC tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya, sistem intelijen dan investigasi satwa liar memerlukan perangkat teknologi, laboratorium forensik, dan jaringan informasi lintas batas. Tanpa

dukungan anggaran negara, bantuan ICCWC menjadi tidak cukup. Selain itu, sumber daya manusia Peru masih minim dalam bidang forensik satwa liar, analisis data, dan investigasi digital, padahal kejahatan satwa liar kini banyak menggunakan dokumen palsu dan saluran daring. ICCWC tidak dapat mengisi kesenjangan ini sendirian. Dalam kerangka Grindle, sumber daya adalah variabel penentu utama: jika tidak sejalan dengan kompleksitas kebijakan, implementasi akan terhambat. Hal ini terbukti dalam kasus Peru.

Keenam, elemen strategi implementasi menyoroti bahwa ICCWC memiliki pendekatan berbasis kolaborasi internasional dan *capacity building*. Strategi ini efektif untuk menciptakan standar global, tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan domestik Peru yang lebih mendesak, seperti penguatan intelijen lokal, reformasi hukum pidana lingkungan, atau modernisasi teknologi penegakan hukum. Strategi ICCWC terkadang bersifat *top-down*, sehingga negara anggota perlu menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, Peru belum memiliki strategi nasional yang terintegrasi untuk menurunkan pedoman ICCWC ke dalam kebijakan sektoral. Pedoman yang disediakan ICCWC tidak otomatis menjadi kebijakan operasional. Tanpa strategi nasional yang sinkron, banyak instruksi implementasi dari ICCWC berhenti pada level dokumen, tidak masuk ke tingkat operasional.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan *Content of Policy* menunjukkan bahwa kebijakan ICCWC menghadapi hambatan implementasi di Peru bukan karena kelemahan desain kebijakan, tetapi karena ketidaksesuaian antara substansi kebijakan yang kompleks, tuntutan perubahan struktural, serta kapasitas domestik yang terbatas. ICCWC adalah kebijakan internasional yang ambisius, namun Peru sebagai negara pelaksana belum

memiliki sumber daya, prioritas politik, dan koordinasi yang cukup kuat untuk mengoperasionalkannya secara penuh. Dengan demikian, kebijakan ICCWC menghadapi *implementation deficit* yang inheren pada negara dengan kapasitas institusional sedang. Temuan ini menegaskan proposisi utama teori Grindle: bahwa kebijakan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang baik jika desain kebijakan tidak disesuaikan dengan kapasitas negara pelaksana dan konteks birokrasi domestik.

Analisis Implementasi ICCWC di Peru Berdasarkan *Context of Implementation*

Analisis implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) dalam konteks Peru menjadi semakin jelas ketika menggunakan komponen *Context of Implementation* dari teori Merilee S. Grindle. Jika *Content of Policy* menjelaskan kesesuaian substansi kebijakan ICCWC, maka *Context of Implementation* menilai sejauh mana kondisi politik, kelembagaan, sosial, ekonomi, dan geografis Peru memungkinkan kebijakan tersebut untuk diterjemahkan secara efektif di lapangan. Grindle (1980) menyebut bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan aktor, karakter institusi, budaya birokrasi, respons pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial-ekonomi. Melalui kerangka ini, tampak bahwa hambatan utama implementasi ICCWC di Peru berasal dari realitas internal negara bukan dari kelemahan ICCWC itu sendiri sehingga terjadilah *gap* antara komitmen internasional dan praktik penegakan hukum.

Pertama, dari sisi kekuasaan dan kepentingan aktor, situasi politik Peru yang sering mengalami ketidakstabilan menjadi salah satu faktor terbesar yang melemahkan implementasi kebijakan internasional, termasuk ICCWC. Sejak 2018, Peru mengalami

pergantian kepemimpinan nasional secara berulang dan seringkali disertai perubahan jajaran kementerian serta restrukturisasi birokrasi. Ketidakstabilan politik ini menciptakan lingkungan yang tidak konsisten terhadap prioritas kebijakan lingkungan dan konservasi. Program ICCWC menuntut komitmen jangka panjang dari aparat penegak hukum dan lembaga kementerian, namun stabilitas politik yang rapuh membuat proses perencanaan, evaluasi, dan tindak lanjut sering terputus di tengah jalan. Para pembuat kebijakan baru cenderung mengubah prioritas sektor, sementara agenda konservasi biasanya tidak mendapatkan perhatian utama dibanding isu ekonomi atau politik domestik. Selain itu, kepentingan politik lokal sering lebih condong pada sektor ekonomi ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan kayu, yang sebagian beroperasi dekat dengan jaringan perdagangan satwa liar. Ketika aktor politik setempat memperoleh manfaat politik atau ekonomi dari industri tertentu, kepatuhan terhadap standar ICCWC menjadi semakin rendah. Dengan demikian, kekuasaan aktor di Peru tidak selalu selaras dengan kepentingan ICCWC untuk memperkuat penegakan hukum satwa liar.

Kedua, karakter dan kapasitas institusi pelaksana menjadi faktor penting dalam konteks implementasi ICCWC. Peru memiliki sejumlah lembaga yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan satwa liar: SERFOR sebagai otoritas kehutanan dan satwa liar, Policía de Protección del Medio Ambiente, otoritas bea cukai SUNAT, kantor kejaksaaan lingkungan (FEMA), hingga lembaga kehakiman. Namun, struktur kelembagaan ini terfragmentasi dan sering kali tumpang tindih. SERFOR memiliki kewenangan administratif, tetapi penindakan berada pada polisi lingkungan dan kejaksaaan; sementara bea cukai bertanggung jawab atas titik masuk dan

keluar negara. Fragmentasi ini menyebabkan koordinasi berjalan lambat dan respons antar lembaga tidak sinkron. ICCWC mengharuskan integrasi data lintas lembaga, tetapi Peru belum memiliki sistem berbagi informasi yang terstandarisasi sehingga banyak kasus tidak tertangani secara berkelanjutan. Misalnya, penyitaan satwa liar di bandara atau pelabuhan tidak selalu diteruskan menjadi proses litigasi karena komunikasi antara SUNAT dan kejaksaan tidak terintegrasi. Kelemahan organisasi internal ini membuat instrumen ICCWC misalnya *Wildlife Crime Analytic Toolkit* sulit diimplementasikan karena membutuhkan kerja sama lintas birokrasi yang solid. Dalam kerangka Grindle, institusi yang lemah menjadi hambatan struktural bagi implementasi kebijakan yang kompleks seperti ICCWC.

Ketiga, karakter rezim politik dan budaya birokrasi Peru turut mempengaruhi implementasi. Birokrasi Peru dikenal memiliki hierarki yang kaku, prosedur yang panjang, dan lambat dalam mengadopsi kebijakan baru, apalagi kebijakan yang berasal dari mekanisme internasional. ICCWC mendorong negara untuk menerapkan pendekatan investigatif modern, termasuk penggunaan intelijen, audit risiko, investigasi keuangan, dan kerja sama lintas batas. Namun, birokrasi Peru cenderung konservatif dalam perubahan prosedur, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, beberapa lembaga penegak hukum menghadapi masalah internal seperti kurangnya transparansi, dugaan korupsi, dan lemahnya pengawasan internal. Ketika budaya birokrasi lebih berorientasi pada administrasi daripada pada pengawasan aktif, implementasi ICCWC menjadi lambat. Grindle menekankan bahwa karakter rezim politik dan birokrasi menentukan seberapa cepat kebijakan berubah menjadi tindakan. Dalam kasus Peru, birokrasi

yang tidak adaptif dan budaya kerja yang hierarkis menghambat proses internalisasi instrumen ICCWC.

Keempat, elemen kepatuhan dan respons pelaksana di tingkat lapangan menjadi kunci dalam konteks implementasi. Pelaksana kebijakan — polisi lingkungan, petugas bea cukai, penyidik, dan petugas konservasi — merupakan aktor yang menentukan efektivitas ICCWC. Namun, banyak pelaksana di Peru menghadapi keterbatasan kompetensi teknis, minimnya pelatihan, dan kurangnya fasilitas operasional. Sebagian besar aparat di wilayah Amazon atau daerah terpencil tidak memiliki akses pada teknologi forensik, perangkat identifikasi spesies, atau sistem informasi modern seperti yang disarankan ICCWC. Di beberapa daerah, aparat bahkan tidak memiliki transportasi memadai untuk melakukan patroli. Ketidakmampuan teknis ini menyebabkan banyak rekomendasi ICCWC tidak dapat dijalankan. Selain itu, tingkat risiko pelaksana di lapangan sangat tinggi. Jaringan kejahatan satwa liar sering terkait dengan kelompok kriminal terorganisasi yang memiliki kekuatan finansial dan akses ke jaringan perdagangan ilegal lainnya. Aparat sering mendapat intimidasi atau ancaman, sementara perlindungan terhadap mereka terbatas. Dalam kondisi seperti ini, respons pelaksana terhadap kebijakan ICCWC menjadi pasif atau minimal. Ketika pelaksana tidak memiliki insentif maupun perlindungan, mereka tidak mampu menjalankan kebijakan secara optimal, sehingga *implementation deficit* tidak dapat dihindari.

Kelima, kondisi sosial-ekonomi Peru, terutama di wilayah Amazon, sangat memengaruhi implementasi ICCWC. Banyak komunitas lokal bergantung pada pemanfaatan satwa liar untuk kebutuhan ekonomi harian, seperti perdagangan daging hewan liar,

penjualan spesimen ke pedagang kota, atau bekerja sebagai pengumpul untuk jaringan perdagangan transnasional. ICCWC mendorong pendekatan penegakan hukum yang kuat, namun tidak langsung menyediakan insentif ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal. Ketika struktur ekonomi lokal tidak berubah, masyarakat tetap menjadikan perdagangan satwa liar sebagai sumber pendapatan. Kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi pada akhirnya mengalami resistensi pasif dari komunitas lokal. Selain itu, angka kemiskinan di beberapa wilayah Amazon membuat konservasi tidak menjadi prioritas bagi penduduk setempat. Dalam kerangka Grindle, kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung membuat implementasi kebijakan konservasi menjadi jauh lebih kompleks.

Keenam, kondisi geografis Peru, khususnya wilayah Amazon yang luas dan sulit dijangkau, menjadi faktor struktural yang menghambat implementasi ICCWC. Permukaan hutan Amazon yang terhubung dengan Brasil, Kolombia, dan Bolivia memiliki rute perdagangan satwa liar yang sangat sulit dipantau. Pos perbatasan terbatas, patroli tidak rutin, dan banyak jalur sungai yang digunakan sebagai rute penyelundupan tanpa pengawasan. ICCWC memang menyediakan pedoman penguatan pengawasan perbatasan, tetapi kemampuan pemerintah Peru untuk memantau ribuan kilometer wilayah hutan sangat terbatas. Kondisi geografis ini menciptakan *enforcement vacuum*: ruang di mana hukum tidak dapat ditegakkan secara konsisten karena kendala fisik yang melekat. Selama kondisi geografis memberikan peluang bagi kriminal, implementasi kebijakan ICCWC akan tetap terhambat.

Secara keseluruhan, analisis *Context of Implementation* menunjukkan bahwa kegagalan implementasi ICCWC di Peru

bukan berasal dari desain kebijakan internasional, melainkan dari kondisi internal Peru yang belum siap menerima kebijakan dengan kompleksitas tinggi. Ketidakstabilan politik, fragmentasi kelembagaan, kapasitas birokrasi yang terbatas, resistensi pelaksana, tantangan sosial-ekonomi masyarakat lokal, serta kondisi geografis Amazon menjadi faktor yang memperlemah efektivitas ICCWC. Temuan ini memperkuat argumen Grindle bahwa implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kebijakan dan konteks negara pelaksana. Dalam kasus Peru, ICCWC berada di lingkungan implementasi yang penuh hambatan struktural, teknis, dan politis, sehingga pencapaian hasil kebijakan masih jauh dari optimal.

Integrasi Analitis: Kesesuaian Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi dalam ICCWC

Sintesis dari temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru merupakan hasil interaksi antara desain kebijakan internasional yang kompleks dan kapasitas domestik yang terbatas. Dari sisi Content of Policy, ICCWC membawa instrumen yang menuntut perubahan kelembagaan signifikan meliputi integrasi data, penguatan investigasi, peningkatan kapasitas forensik, serta koordinasi lintas lembaga. Kebijakan ini juga menawarkan manfaat jangka panjang yang bersifat non-material, seperti peningkatan kapasitas birokrasi, yang tidak selalu memberikan keuntungan politik langsung. Tingkat perubahan yang diharapkan oleh ICCWC terlalu tinggi dibanding sumber daya Peru, baik anggaran, teknologi, maupun SDM. Hal ini menghasilkan *policy design–capacity mismatch* yang menghambat adopsi penuh instrumen ICCWC.

Sementara itu, dari sisi Context of Implementation, tantangan Peru semakin berat karena ketidakstabilan politik, fragmentasi kewenangan antar lembaga (SERFOR, polisi lingkungan, bea cukai, dan kejaksaan), serta budaya birokrasi yang hierarkis dan lamban mengadopsi standar internasional. Pelaksana lapangan menghadapi keterbatasan logistik, minim pelatihan, serta risiko tinggi karena jaringan kriminal satwa liar terhubung dengan kelompok terorganisasi. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Amazon yang bergantung pada satwa liar sebagai sumber pendapatan, serta geografis hutan yang luas dan sulit diawasi, memperlebar kesenjangan antara kebijakan dan implementasi nyata.

Dengan menggabungkan kedua dimensi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ICCWC di Peru sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara desain kebijakan internasional dan konteks domestik. Untuk memperbaiki implementasi, Peru membutuhkan *measures* berupa: penguatan sistem koordinasi nasional, pembangunan kapasitas teknis aparat, peningkatan alokasi anggaran penegakan hukum, pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal, serta adopsi teknologi pengawasan berbasis risiko. Tanpa penyesuaian ini, ICCWC akan tetap menjadi komitmen normatif tanpa perubahan substantif di tingkat lapangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru belum efektif terutama karena adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan ICCWC dan kapasitas implementatif di tingkat nasional. Dari sisi *content of policy*, instrumen ICCWC sebenarnya

menyediakan kerangka teknis dan asistensi yang penting, namun manfaatnya bersifat jangka panjang, membutuhkan perubahan institusional besar, dan tidak memberikan insentif politik langsung sehingga tidak menjadi prioritas nasional Peru. Sementara itu, dari sisi *context of implementation*, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta kondisi geografis Amazon yang sulit dijangkau menyebabkan kebijakan sulit diterjemahkan ke tindakan yang konsisten. Ketidakstabilan politik Peru turut memperlemah keberlanjutan program. Dengan demikian, hambatan efektivitas ICCWC di Peru terutama berasal dari gap antara kompleksitas desain kebijakan internasional dan realitas kapasitas birokrasi domestik.

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC) di Peru belum efektif karena adanya ketimpangan antara desain kebijakan yang menuntut perubahan teknis-institusional besar dan kapasitas implementatif Peru yang terbatas, sementara konteks politik, kelembagaan, dan geografis negara tersebut tidak memberikan ruang yang memadai bagi penerjemahan komitmen internasional menjadi tindakan konkret yang konsisten. Tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas lembaga, rendahnya prioritas politik, keterbatasan anggaran, serta tantangan pengawasan di wilayah Amazon menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas ICCWC. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antara SERFOR, Kepolisian Lingkungan, dan Bea Cukai; peningkatan kapasitas teknis dan teknologi investigatif; penetapan prioritas politik yang lebih jelas; serta adaptasi instrumen ICCWC agar lebih kontekstual dengan tantangan geografis dan institusional Peru. Secara akademis, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif antarnegara Amazon, eksplorasi peran aktor non-negara, serta penerapan kerangka teori alternatif atau pendekatan campuran untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi

kebijakan internasional di negara berkembang.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim Mahfud Zubaidi. (2025). *Peruvian Government's Strategy Against Wildlife Trafficking: From Intelligence Operations to Strict Law Enforcement*. Islamic State of Sunan Ampel University.
- Aqila, N., & Zubaidi, A. K. M. (2025). Measure's of the Indian Government in Combating Illegal Wildlife Trafficking: A Green Theory Approach from a Post-Positivist Perspective in International Relations Departments. *Loka: Journal of Environmental Sciences*, 2(1), In Press.
- Baker, S. E., Cain, R., van Kesteren, F., Zommers, Z. A., D'Cruze, N., & Macdonald, D. W. (2013). Rough Trade: Animal Welfare in the Global Wildlife Trade. *BioScience*, 63(12), 1–12.
- Delgado, Javier. 2023. *Political Instability and Environmental Governance in the Amazon Region*. Lima: Instituto de Estudios Amazónicos.
- International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC). 2023. *ICWC Annual Report 2023: Strengthening Global Responses to Wildlife Crime*. Vienna: UNODC.
- Mahfud Zubaidi. 2024. "Kapasitas Implementatif Negara Berkembang dalam Rezim Lingkungan Internasional." *Jurnal Administrasi Publik* 18(2): 145–160.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2022. *World Wildlife Crime Report 2022*. Vienna: UNODC.
- SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). 2021. *Reporte Nacional sobre Tráfico de Fauna Silvestre en el Perú*. Lima: SERFOR.
- CITES Secretariat. (2020). *Annual Illegal Trade Report*. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
- CITES Secretariat. (2023). *Implementation and Compliance Reports*. CITES.org.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative,*

Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Grindle, M. S. (1980). Policy Content and Context in Implementation. In M. S. Grindle (Ed.), *Politics and Policy Implementation in the Third World* (pp. 3–34). Princeton University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Ministerio del Ambiente del Perú. (2018). *Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 29763*. Lima: MINAM.

Ministerio del Ambiente del Perú. (2020). *Plan Nacional Contra el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2020–2030*. Lima: SERFOR.

Moorhouse, T. P., Elwin, A., Perez-Peña, P. E., Perez, D., Solis, S., Zari, L., & D’Cruze, N. C. (2023). The Consumption of Wildlife-Origin Products and Implications for Demand Reduction in Amazonian Peru. *Global Ecology and Conservation*, 48, 1–15.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.

SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2019). *Reporte Nacional de Fiscalización y Control de Fauna Silvestre*. Lima: Gobierno del Perú.

SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. (2021). *Informe Técnico de Seguimiento a Implementación CITES en Perú*. Lima: Gobierno del Perú.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2022). *Boletín Estadístico de Incautaciones de Fauna Silvestre*. Lima: SUNAT.

SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2023). *Reporte Oficial sobre Tráfico de Vida Silvestre en Puestos Fronterizos*. Lima: SUNAT.

TRAFFIC International. (2021). *Wildlife Trade in Latin America: Regional Assessment Report 2015–2020*. Cambridge: TRAFFIC.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *World Wildlife Crime Report*. Vienna: UNODC.

UNODC. (2023). *Illegal Wildlife Trade as Transnational Organized Crime: Latin America Report*. Vienna: UNODC.

WWF. (2021). *Peru Illegal Wildlife Trade Assessment*. World Wildlife Fund International.

WWF Perú. (2020). *Jaguar Trade in the Amazon Basin: Threats and Enforcement Gaps*. Lima: WWF.

Yuliani, N., & Suryadi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Lingkungan di Negara Berkembang: Studi Perbandingan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 112–129.

Zubaidi, A. K. M., & Faizal, I. W. (2025). Advancing Energy Transition: Solar PV and Battery Energy Storage Integration in Indonesia–South Korea Cooperation. *Loka: Journal of Environmental Sciences*, 2(4), In Press.

Zubaidi, A. K. M. (2024). The Indonesian Government's Plan to Join BRICS Under the Leadership of Prabowo Subianto. *Journal of Political and Legal Sovereignty*, 2(3), July–Septem